LA ZHULMA
Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 6 No. 1, Maret 2025 E-ISSN: 2963-9069

EKONOMI SYARIAH, MCDA-WDMA DAN PENTAHELIX COLLABORATION DI KOTA TASIKMALAYA

Junjun Arip Nugraha,
Institut Agama Islam Tasikmalaya
junjun_an@iaitasik.ac.id

Abstrak

Keterbatasan integrasi ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya menjadi tantangan serius, meskipun wilayah ini memiliki potensi demografis, sosial, dan kultural Islam yang kuat. Ketidaksinkronan kebijakan antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta kurangnya dukungan eksplisit dari pemerintah kota menyebabkan pengembangan ekosistem ekonomi syariah belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan berbasis bukti untuk pengembangan ekonomi syariah Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain exploratory sequential dalam kerangka Research and Development (R&D). Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis kebijakan, serta wawancara mendalam dan kuesioner. Objek penelitian adalah ekosistem ekonomi syariah Kota Tasikmalaya, yang mencakup struktur kelembagaan, aktor ekonomi, serta interaksi antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 variabel kunci yang dianalisis, terdapat lima prioritas strategis utama berdasarkan model MCDA-WDMA: (1) sinkronisasi kebijakan antara kota dan provinsi, (2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi syariah, (3) digitalisasi layanan ekonomi syariah, (4) pelibatan komunitas pesantren dan ormas Islam, serta (5) insentif fiskal dan regulasi afirmatif. Penilaian bobot dinamis dari para pemangku kepentingan menunjukkan dominasi preferensi pada kolaborasi Pentahelix. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan MCDA-WDMA mampu menghasilkan kerangka prioritas yang adaptif dan berbasis bukti.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, MCDA-WDMA, Perencanaan Strategis, Kota Tasikmalaya, Metode Campuran.

Abstract

The limited integration of Islamic economic principles into Tasikmalaya City's planning documents poses a significant challenge, despite the city's strong demographic and Islamic cultural base. Policy fragmentation between the city and surrounding regions, along with weak municipal support, has hindered the development of a robust Islamic economic ecosystem. This study aims to formulate evidence-based strategic directions for Islamic economic development in Tasikmalaya.Using a mixed-methods approach with an exploratory sequential design within a Research and Development (R&D) framework, data were gathered from literature analysis, policy review, in-depth interviews, and structured questionnaires. The object of the study includes the institutional, stakeholder, and interactional dimensions of the Islamic economic ecosystem in Tasikmalaya City. The study identifies five key strategic priorities from twelve assessed variables using the MCDA-WDMA model: (1) intergovernmental policy synchronization, (2) strengthening Islamic economic institutions, (3) digital transformation of Islamic services, (4) community engagement through pesantren and Islamic organizations, and (5) fiscal incentives and affirmative regulation. Dynamic weight analysis from stakeholders reveals a dominant preference for Pentahelix collaboration. These findings confirm the utility of MCDA-WDMA in generating context-sensitive, evidence-based development frameworks.

Keywords: Islamic Economics, MCDA-WDMA, Strategic Planning, Tasikmalaya, Mixed Methods

PENDAHULUAN

Sepanjang dan pasca pandemi Covid-19 menjadi periode yang berat bagi perekonomian Indonesia dan dunia. PandemI telah memaksa perekonomian global, nasional, dan regional khususnya Indonesia mengalami kontraksi atau pelambatan cukup signifikan dan berefek domino(Mauludi & Mardani, 2022). Rantai pasok global yang terganggu mendorong banyak negara untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan keunggulan absolut masing-masing(Dede Aji Mardani, Masuroh, & Ali, 2023).

Khususnya di Indonesia, pandemi semakin menegaskan posisi dan potensi sektor ekonomi dan keuangan syariah yang dapat diandalkan sebagai alternatif yang paling potensial mengingat relevansi prinsip dasar dan bukti empirik yang dimilikinya, serta kinerjanya yang berdaya tahan di tengah masa pandemi. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan tren positif penting menjadi perhatian dan mendapat dukungan secara maksimal agar dapat berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional(Dede Aji Mardani, 2022). Pengkondisian lingkungan yang kondusif dan ruang-ruang peluang bagi industri halal dan keuangan syariah di Indonesia agar semakin mampu dan handal memenuhi senjang pelayanan keuangan sebagai penopang sektor riil menjadi agenda strategis dimasa depan.

Masa-masa pandemi juga menegaskan arti penting keuangan mikro dan keuangan sosial syariah dalam peran mitigasi problem pengangguran dan kemiskinan baik kuantitas, kedalaman maupun keparahannya(Nouairi, Affatati, Rivoira, Albaina, & Ghribi, 2024). Selain itu, secara alami dunia usaha yang mengubah strategi marketing yang semakin memanfaatkaan platform marketing digital, terbukti mampu mengakselerasi kontraksi dan keluar dari keterbatasan kanal produksi maupun distribusi. Kinerja sektor atau kemudian populer dengan sebutan ekosisyem ekonomi dan keuangan syariah memberi kontribusi penting dalam bauran kebijakan nasional dan regional untuk menghadapi tahun-tahun pasca pandemi yang berpotensi sulit atau rawan terjadi resesi bahkan krisis(Ferdi Pratama & Muhammad Subhan, 2024; Dede Aji Mardani & Abidin, 2024a).

Provinsi Jawa Barat ditinjau dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alam memiliki potensi besar dan prospektif dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Provinsi dengan profil demografi jumlah penduduk terbesar nasional, yaitu sekitar 49 juta jiwa dimana 98% berpenduduk muslim(Dede Aji Mardani & Abidin, 2024b), menjadikan Jawa Barat strategis sebagai poros ekonomi syariah dan inovasinya. Dengan potensi sektor unggulan seperti pariwisata ramah muslim dengan berbagai atributnya, ragam kuliner halal baik industri maupun perdagangan, salah satu sentra fesyen halal serta kiblat kosmetik halal, menjadikan Provinsi Jawa Barat memiliki kesempatan dan peluang mendominasi pasar nasional dan internasional..

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan strategis yang berbasis data dalam

pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya, khususnya dalam konteks pasca pandemi Covid-19. Melalui pendekatan MCDA-WDMA (Multi-Criteria Decision Analysis–Weighted Dynamic Multi-Attribute)(Ghazi et al., 2021; Matem et al., 2024), penelitian ini ingin mengidentifikasi potensi dan tantangan ekonomi syariah lokal, mengevaluasi kesenjangan kebijakan antar wilayah, serta menghasilkan rekomendasi yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga ditujukan untuk menyelaraskan arah pembangunan ekonomi daerah dengan visi pembangunan ekonomi syariah nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai aplikasi model pengambilan keputusan multikriteria dalam perencanaan ekonomi syariah daerah. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis bukti, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, tangguh, dan kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak langsung pada Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga menjadi model atau best practice yang relevan untuk daerah-daerah lain di Indonesia atau kawasan dunia Islam yang memiliki karakteristik serupa(Hidayat & Mardani, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan bauran atau campuran (mixed methods) dengan rancangan exploratory sequential design dalam kerangka Research and Development (R&D)(Sos & MM, 2023). Pendekatan mixed methods merupakan pendekatan yang mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penelitian.Subjek dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur ilmiah, dokumen regulasi, dokumen kebijakan, serta publikasi statistik yang relevan. Seluruh sumber tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan landasan teori, memahami konteks empiris, serta mendukung proses analisis dalam penelitian. Sementara itu, objek penelitian ini adalah ekosistem ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya. Objek ini mencakup struktur, aktor, interaksi, serta kebijakan yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah di wilayah tersebut(MIKom, 2023). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu enumerating, editing, organizing, dan finding. Tahap pertama, enumerating, dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh data yang relevan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder(Santoso, 2021)

PEMBAHASAN

Analisis makroekonomi dan ekonomi syariah global menggunakan pendekatan yang

digunakan World Economic Outlook (IMF), Global Economic Prospect (World Bank), dan Global Islamic Economy Report (Thomson Reuters). Terdapat tiga indikator utama yang digunakan dalam analisis makroekonomi global, yaitu indikator aktivitas global (global activity indicators) yang mencakup peningkatan produk domestik bruto (PDB/GDP growth), kemudian perdagangan dunia (world trade), dan inflasi global (global inflation)(D A Mardani, 2022). Sementara itu, analisis sektor ekonomi syariah global akan dibahas dari perspektif ekonomi halal, baik sektor riil maupun keuangan(Lestari, Dian, Hasan, & Suri, 2022).

Terkait indikator pertama, secara umum makroekonomi global relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Namun, persaingan perdagangan dunia semakin intens. Misalnya kebijakan proteksi Amerika Serikat (America First). Hal ini mengakibatkan prospek ekonomi global mengalami koreksi, meski masih dalam kisaran yang relatif stabil. Sementara proyeksi ekonomi syariah global cenderung lebih baik. Seperti perekonomian negara- negara Muslim berpendapatan tinggi di kawasan Teluk (Gulf Cooperation Council – GCC) yang tetap stabil. Lainnya adalah negara-negara dengan pendapatan di tingkat menengah (middle income) dengan populasi Muslim yang besar: seperti Indonesia, Turki, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan, yang juga mengalami hal sama.

	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
IMF	2,80	2,47	3,16	3,37	3,29	3,00
World Bank	2,80	2,44	3,05	3,10	3,03	2,90

Sumber: IMF dan World Bank (2018)

Tabel 1
Pertumbuhan ekonomi dunia

Indikator makroekonomi global yang kedua adalah perdagangan dunia. Pertumbuhan volume perdagangan global (% change) dalam lima tahun terakhir mengalami tren yang positif 3%-5%, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global 2019 dan 2020 berada di angka 4%, atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada dua tahun sebelumnya.

	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
IMF	2,74	2,27	4,88	5,08	4,66	4,29
World Bank	2,70	2,30	4,30	4,00	3,90	3,80

Sumber: IMF dan World Bank (2018)

Tabel 2
Proyeksi volume perdagangan dunia

Indikator ketiga adalah inflasi global. Selama lima tahun terakhir, inflasi yang terjadi berada pada angka 1 – 2 persen (Bank Dunia) dan 2 – 3 persen (IMF). Angka tersebut cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksinya pada 2019-2020 menurut World Economic Outlook, yaitu 3.36 dan 3.30 persen

.

	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
IMF	2,78	2,76	3,04	3,49	3,36	3,30
World Bank	1,4	1,5	2,2	n/a	n/a	n/a

Sumber: IMF dan World Bank (2018)

Tabel 3
Inflasi Dunia dalam %

Sektor ekonomi syariah menjadi perhatian ketika lembaga global (Thomson Reuters) mempublikasikan potensi belanja konsumen Muslim untuk berbagai produk konsumtif. Lembaga tersebut mencatat peningkatan daya beli Muslim di seluruh dunia, sehingga mempengaruhi perekonomian global .

	Produk Halal	Makanan dan Minuman	Media dan Rekreasi	Farmasi	Kosmetik	Pariwisata	Fesyen
Jumlah	2 T	1,2 T	198 M	83 M	57,4	169 M	254 M

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah, 2018

Tabel 4
Konsumsi Industri Halal

Secara global, konsumen Muslim terus menjadi kelompok yang tumbuh paling cepat di dunia. Perbandingannya adalah satu dari empat orang di seluruh dunia adalah seorang Muslim. Pada 2050, total penduduk bumi yang memeluk Islam diprediksi menjadi 2,8 miliar jiwa atau sekitar sepertiga penduduk dunia. Mayoritas mereka berasal dari kawasan Asia Pasifik (Mastercard, 2018).

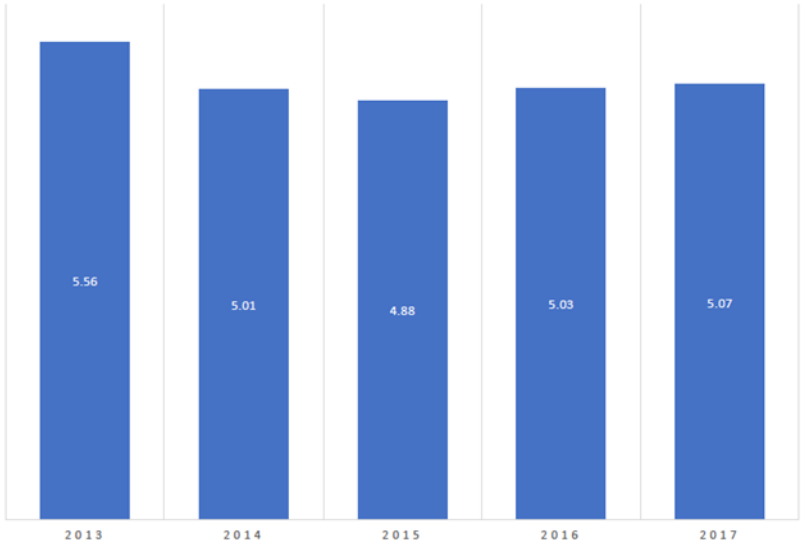

Gambar 1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Berdasarkan pengeluaran, pendapatan nasional masih ditopang konsumsi masyarakat yang pada tahun 2017 kontribusinya mencapai 56,13 persen PDB. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan konsumsi tersebut berada pada level pertumbuhan ekonomi sekitar 4,95 persen (yoy).

A. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang disusun oleh KNEKS tidak hanya merupakan dokumen perencanaan strategis, tetapi juga menjadi blueprint nasional yang memberikan arah kebijakan jangka panjang bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dokumen ini menegaskan pentingnya pendekatan ecosystem-based development yang melibatkan sinergi lintas sektor dan pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media). Dengan demikian, pelaksanaan ekonomi syariah tidak hanya dilakukan secara sektoral dan parsial, melainkan secara sistemik dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Prinsip inilah yang menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ekonomi syariah(Ferdi Pratama & Muhammad Subhan, 2024; D A Mardani, 2021).

Salah satu aspek kunci dalam masterplan adalah pemberdayaan UMKM halal. UMKM dipandang sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang juga menjadi kekuatan utama dalam ekonomi keumatan(Matiin, Mursalim, & ..., 2024). Dalam kerangka ekonomi syariah, penguatan UMKM tidak sekadar menyasar pada aspek produktivitas, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal dan thayyib, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Pemerintah mendorong fasilitasi sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah, dan dukungan pemasaran berbasis digital. Di Tasikmalaya, yang memiliki basis UMKM yang kuat dan berorientasi nilai Islam, strategi ini sangat relevan dan potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain UMKM, penguatan industri makanan dan minuman halal menjadi pilar penting dalam masterplan(Bukhari, Woodside, Hassan, Hussain, & Khurram, 2022). Industri ini memiliki potensi pasar yang sangat besar baik secara domestik maupun internasional. Masterplan mendorong standarisasi, sertifikasi, serta inovasi produk yang berbasis pada kebutuhan konsumen muslim global. Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu sentra kuliner dan produsen makanan lokal, memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri makanan halal. Dukungan dari dinas terkait, lembaga sertifikasi halal, dan pelatihan teknis kepada pelaku usaha menjadi langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal(Dede Aji Mardani, 2020).

Aspek lainnya adalah digitalisasi layanan keuangan syariah, yang menjadi respon terhadap tuntutan zaman di mana teknologi digital semakin mendominasi kehidupan ekonomi. Penguatan ini mencakup pengembangan fintech syariah, digitalisasi sistem pembiayaan

mikro, serta layanan zakat dan wakaf berbasis teknologi. Tujuannya adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan sesuai prinsip syariah. Tasikmalaya dapat mengembangkan inisiatif lokal seperti koperasi digital syariah atau platform pembayaran zakat online yang berbasis komunitas, dengan menggandeng kalangan pesantren, BMT, dan pelaku IT lokal(D A Mardani, 2022).

Dalam konteks implementasi di daerah, Tasikmalaya memiliki potensi besar untuk menjadi pilot project dalam penguatan ekonomi syariah berbasis masterplan nasional. Identitas keislaman yang kuat, jejaring pesantren yang luas, dan keberadaan UMKM berbasis nilai-nilai keumatan menjadi modal sosial dan budaya yang sangat mendukung. Pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya perlu menyusun rencana aksi daerah (RAD) ekonomi syariah yang selaras dengan masterplan nasional, termasuk kebijakan afirmatif untuk pengembangan koperasi syariah, digitalisasi sektor keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM ekonomi syariah. Dengan sinergi yang kuat, Tasikmalaya berpotensi menjadi salah satu pusat ekonomi syariah regional yang unggul dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023–2026(Aji Mardani & Aji, 2023).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023–2026 hadir sebagai kelanjutan dari RPJMD sebelumnya, sekaligus menjadi dokumen transisi menuju RPJMD periode selanjutnya. Dalam dokumen ini, terlihat adanya penajaman visi pembangunan daerah yang lebih menekankan pada penguatan nilai-nilai lokal, spiritualitas, dan prinsip kolaboratif dalam setiap aspek pembangunan. Narasi ini memberikan ruang strategis yang luas bagi masuknya pendekatan berbasis ekonomi syariah sebagai model alternatif dalam mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ekonomi syariah, yang berpijak pada nilai keadilan sosial, solidaritas, dan keberkahan, memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi daerah.

Dalam konteks kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, RPD 2023–2026 menekankan pentingnya inklusi sosial dan partisipasi komunitas dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Ini sejalan dengan pendekatan ekonomi syariah yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pemerataan hasil dan keadilan distribusi. Program-program seperti pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, revitalisasi ekonomi pesantren, dan penguatan peran perempuan dalam ekonomi lokal sangat potensial untuk disinergikan dengan program-program ekonomi syariah nasional yang dicanangkan oleh KNEKS dan kementerian terkait(Keller, Derksen, Kötting, Schmiedhofer, & Lippke, 2021).

Transformasi digital menjadi isu sentral dalam RPD Kota Tasikmalaya, dengan penekanan pada perluasan akses digital bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta adopsi teknologi dalam

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Ini memberikan peluang besar bagi pengembangan fintech syariah, digitalisasi layanan keuangan mikro berbasis syariah, serta platform distribusi dan pemasaran produk halal yang terintegrasi. Pemerintah kota dapat mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi digital, komunitas pesantren, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem digital ekonomi syariah lokal yang kuat dan mandiri.

Selanjutnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu prioritas utama dalam RPD ini(Almazrouei, Morgan, & Dror, 2023). Peningkatan kapasitas tenaga kerja, wirausaha muda, dan aparatur sipil negara dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguatan link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan sektor riil. Dalam konteks ekonomi syariah, ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan keuangan syariah, pelatihan kewirausahaan halal, serta penguatan literasi zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah di berbagai lapisan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan di Tasikmalaya bisa menjadi mitra strategis dalam proses ini.

Dengan berbagai arah kebijakan tersebut, RPD Kota Tasikmalaya 2023–2026 memberikan fondasi yang kuat untuk mengarusutamakan ekonomi syariah sebagai salah satu pendekatan pembangunan utama di tingkat lokal. Pengarusutamaan ini tidak hanya bermakna integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan sosial masyarakat. Jika direspons secara sistematis dan kolaboratif melalui dukungan regulasi, kemitraan strategis, dan penguatan kapasitas lokal, Kota Tasikmalaya berpeluang menjadi model pembangunan ekonomi syariah yang berbasis nilai, partisipatif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

B. Analisis Strategis Klaster Ekonomi Syariah Prioritas Berbasis Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) - Weighted Decision Matrix Analysis (WDMA)

Pengembangan klaster Halal Value Chain merupakan titik tolak yang fundamental dalam membangun sistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing global. Hal ini dikarenakan rantai nilai halal tidak sekadar menjadi bagian dari sistem produksi barang dan jasa, tetapi mencerminkan pemenuhan aspek thayyib dan syar'i yang menjadi fondasi dasar ekonomi Islam(Islam, Aziz, Alauddin, Kader, & Islam, 2024). Dengan penerapan metode Weighted Decision Matrix Analysis (WDMA), analisis terhadap klaster ini menunjukkan bahwa aspek sertifikasi halal dan modernisasi rumah potong hewan mendapatkan bobot nilai yang tinggi karena dampaknya yang signifikan terhadap trust konsumen dan efisiensi produksi. Sertifikasi halal bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga instrumen strategis untuk memasuki pasar global yang mengutamakan jaminan kualitas dan keberlanjutan

(sustainability)(Goyal, Kumar, & Kumar, 2020).

Dalam klaster ini, pembangunan Halal Zone—yang meliputi kawasan industri halal terpadu—dapat menjadi pengungkit utama integrasi sektor hulu-hilir. Strategi ini memerlukan sinergi antara lembaga pemeriksa halal, pemerintah daerah, investor swasta, dan pelaku industri lokal. Selain itu, pariwisata ramah Muslim sebagai bagian dari klaster ini, menunjukkan potensi tinggi jika dikembangkan dengan pendekatan spiritual tourism yang tidak hanya menargetkan destinasi, tetapi juga pengalaman relijius yang holistik. Misalnya, pengembangan kawasan ziarah, wisata sejarah Islam lokal, serta dukungan infrastruktur seperti mushola representatif, layanan makanan halal bersertifikasi, dan akomodasi yang memenuhi prinsip syariah. Ketersediaan database halal yang terhubung secara digital dengan sistem sertifikasi, logistik, dan distribusi juga menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung traceability dan transparansi produk.

1. **Transformasi Klaster UMKM Syariah melalui Digitalisasi dan Integrasi Ekosistem Pembiayaan**

Klaster UMKM Syariah merupakan tulang punggung ekonomi umat yang perlu diintervensi dengan pendekatan strategis berbasis pembiayaan terintegrasi dan perluasan pasar. Dalam hasil analisis MCDA-WDMA, pengembangan database UMKM Syariah dan sistem pembinaan berkelanjutan memperoleh nilai preferensi tinggi karena menjadi basis pengambilan kebijakan yang akurat(Ninci, 2023). Saat ini, banyak UMKM Syariah yang tersebar di berbagai wilayah belum terhubung dalam satu sistem informasi yang terstandar, menyebabkan duplikasi program dan inefisiensi dalam pemberdayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi digital yang memungkinkan pendataan real-time, klasifikasi produk, dan pemetaan potensi berdasarkan wilayah dan sektor(Ghazi et al., 2021).

Sementara itu, pembiayaan terintegrasi yang menggabungkan pembiayaan mikro syariah, skema bagi hasil, serta dukungan modal sosial melalui zakat dan wakaf produktif, menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM. Penilaian MCDA juga menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan syariah, akses pasar digital, serta penyederhanaan proses sertifikasi halal bagi produk UMKM menjadi faktor determinan kesuksesan klaster ini. Pemerintah dan otoritas keuangan syariah perlu merancang insentif dan regulasi yang berpihak kepada UMKM, seperti keringanan pajak, subsidi sertifikasi halal, serta kemudahan akses ke pembiayaan syariah berbasis akad yang tidak memberatkan. Program inkubasi dan akselerasi bisnis yang dilakukan oleh pesantren dan masjid juga terbukti memiliki dampak sosial yang tinggi, karena melibatkan aspek spiritualitas dan pemberdayaan komunitas. Kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan regulator dalam bentuk triple helix juga menjadi pendekatan yang direkomendasikan oleh MCDA untuk memastikan keberlanjutan UMKM Syariah(Hoseinzadeh, Ebadi, Sharif

Nia, Sivarajan Froelicher, & Rahmatpour, 2022).

Ekonomi digital syariah menjadi ujung tombak baru dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi. Dalam analisis strategis MCDA, keberadaan Halal Marketplace dan Pusat Data Ekonomi Syariah memperoleh skor tinggi karena mampu memperluas inklusi pasar dan memberikan dukungan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Halal Marketplace berbasis blockchain dan smart contract dapat menjamin transparansi transaksi, keaslian produk, serta efisiensi dalam distribusi. Integrasi Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk traceability produk halal memungkinkan pelacakan seluruh proses produksi dari hulu ke hilir, sehingga menjawab tantangan kepercayaan konsumen dan kepatuhan syariah. Dalam kerangka WDMA, traceability bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga representasi dari prinsip amanah dan akuntabilitas dalam muamalah. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur digital halal yang menghubungkan pelaku usaha dengan otoritas sertifikasi, lembaga keuangan syariah, dan konsumen secara langsung. Pusat Data Ekonomi Syariah juga menjadi instrumen penting untuk mendukung riset dan kebijakan berbasis bukti, serta mendorong pelibatan akademisi dan komunitas riset dalam mengawal arah transformasi digital ini. Model dashboard ekonomi syariah yang dapat diakses publik dan terintegrasi dengan data kependudukan, perdagangan, dan keuangan syariah menjadi solusi strategis untuk mendorong perencanaan pembangunan berbasis syariah yang partisipatif dan terbuka(Kizielewicz, Shekhovtsov, & Sałabun, 2021).

Salah satu temuan penting dalam pendekatan Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) adalah pentingnya keterhubungan antar klaster sebagai dasar keberhasilan sistem ekonomi syariah. Masing-masing klaster memiliki keunggulan dan perannya sendiri, namun integrasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan. Sebagai contoh, penguatan Halal Value Chain tidak akan efektif tanpa didukung oleh pembiayaan syariah yang inklusif dan layanan keuangan digital yang efisien. Begitu pula, UMKM Syariah tidak dapat berkembang optimal tanpa akses ke pasar digital dan dukungan pembinaan yang terstruktur dari masjid, pesantren, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan ekosistem yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi syariah. WDMA menunjukkan bahwa skema integrasi horizontal (antar pelaku dalam satu klaster) dan vertikal (antar klaster) perlu dirancang secara deliberatif melalui forum koordinasi, regulasi yang sinergis, serta perencanaan pembangunan ekonomi daerah berbasis nilai-nilai Islam. Pemerintah, ormas Islam, akademisi, dan pelaku usaha harus bersatu dalam satu visi besar membangun peradaban ekonomi Islam yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, indikator keberhasilan tidak hanya

diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan umat, menurunnya ketimpangan sosial, dan terbangunnya karakter masyarakat yang beretika dalam berbisnis. Strategi ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, bukan hanya karena jumlah penduduk Muslimnya yang besar, tetapi juga karena kualitas ekosistem yang dibangun secara integratif dan inovatif.

2. Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan Berdasarkan Skema Pentahelix

Dalam skema pengembangan ekonomi syariah berbasis Pentahelix, peran pemerintah menempati posisi sentral sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus regulator. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai enabler yang membuka ruang sinergi lintas sektor dan memastikan keberlanjutan inisiatif ekonomi syariah melalui regulasi yang inklusif dan adaptif(Tadung, 2023). Di Kota Tasikmalaya, Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan sektoral, integrasi program ekonomi umat, serta penguatan kelembagaan klaster ekonomi syariah(Rachmawati, Bahri, Bukhori, & Hidayatullah, 2022).

Dalam pendekatan Weighted Decision Matrix Analysis (WDMA), fungsi koordinatif pemerintah dinilai memiliki bobot yang tinggi dalam efektivitas implementasi program lintas klaster, terutama dalam hal penyusunan rencana aksi daerah, fasilitasi anggaran, serta pembentukan forum ekonomi syariah lintas perangkat daerah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, serta mendorong ekosistem ekonomi digital halal melalui pendampingan UMKM berbasis syariah dan transformasi digital pembayaran(Pratama, Ibrahim, & Akbar, 2023). Kementerian Agama melalui Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya menjadi simpul penting dalam penguatan ekosistem masjid, pesantren, dan lembaga zakat serta wakaf, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan tetapi juga sebagai pelaku ekonomi umat berbasis spiritualitas. BAZNAS Kota Tasikmalaya memperkuat peran negara dalam redistribusi ekonomi berbasis instrumen sosial Islam, khususnya dalam integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif ke dalam skema pembiayaan sosial ekonomi mikro. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam peta pentahelix mencerminkan pentingnya tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang mengedepankan prinsip maqashid syariah sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang pro-uang umat.

a) Akademisi sebagai Inovator Ilmiah dan Motor Knowledge-Based Economy

Akademisi memiliki fungsi strategis sebagai motor penggerak ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), terutama dalam konteks pengembangan ekonomi syariah yang membutuhkan dasar normatif, riset kebijakan, serta model-model pemberdayaan masyarakat yang teruji secara ilmiah dan kontekstual.

Dalam kerangka Pentahelix, keberadaan akademisi dari Program Studi Ekonomi Syariah IAI Tasikmalaya, Program Studi Ekonomi Islam Universitas Siliwangi, serta Program Studi Bisnis Digital Politeknik Bisnis Mayasari Tasikmalaya menjadi elemen penting dalam penciptaan gagasan, pengembangan model integratif ekonomi syariah daerah, dan sebagai mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang evidence-based.

Dengan pendekatan MCDA-WDMA, indikator kontribusi akademisi ditentukan melalui aspek keterlibatan aktif dalam riset terapan, pelatihan peningkatan kapasitas SDM ekonomi syariah, serta keterlibatan dalam forum diskusi publik dan asistensi teknis terhadap pemerintah dan pelaku usaha. Akademisi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun kurikulum pendidikan tinggi ekonomi syariah yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri halal, sekaligus menjembatani antara pengembangan teori dengan praktik bisnis syariah(Malik, 2024). Di Kota Tasikmalaya, kolaborasi lintas kampus yang menggabungkan kekuatan akademik ekonomi, digital, dan kewirausahaan syariah, telah menjadi model sinergi pendidikan tinggi yang berbasis problem solving. Ke depan, akademisi diharapkan dapat mengembangkan inkubator bisnis syariah, pusat studi halal dan zakat-wakaf, serta memperkuat jejaring riset nasional dan internasional, sebagai bagian dari positioning strategis Tasikmalaya dalam peta ekonomi syariah nasional.

b) Dunia Usaha sebagai Penggerak Klaster Produktif dan Inovasi Pasar

Badan usaha dan pelaku bisnis merupakan ujung tombak dari realisasi konsep ekonomi syariah ke dalam praktik yang nyata di lapangan. Dalam peta pemangku kepentingan ekonomi syariah di Tasikmalaya, kehadiran KADIN sebagai asosiasi resmi dunia usaha menjadi penting dalam mengorkestrasi kepentingan para pelaku bisnis agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus merespon kebutuhan pasar yang berkembang(Widodo, 2023). Tiga perwakilan pengusaha yang terlibat aktif dalam inisiatif ekonomi syariah menunjukkan keterbukaan dunia usaha terhadap transformasi model bisnis yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan. Dalam skema WDMA, indikator performa pelaku usaha dinilai dari seberapa besar kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja, inovasi produk halal, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas untuk UMKM berbasis syariah. Dunia usaha juga menjadi mitra penting dalam penyediaan modal, infrastruktur, dan teknologi yang mendukung klaster halal value chain, ekonomi digital syariah, serta integrasi UMKM ke dalam jaringan distribusi modern. Pengusaha diharapkan tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memiliki orientasi sosial (social entrepreneurship) yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam transaksi bisnis. Salah satu strategi yang sedang dikembangkan adalah penguatan sinergi antara pengusaha, pesantren, dan komunitas melalui program

Pesantrenpreneur, di mana modal usaha, pendampingan bisnis, dan akses ke pasar halal difasilitasi secara bersama. Dunia usaha juga menjadi aktor utama dalam mendorong inovasi model bisnis syariah berbasis teknologi, seperti halal e-commerce, financial technology syariah, dan smart farming halal.

c) Masyarakat dan Komunitas sebagai Basis Sosial dan Agen Perubahan

Dalam pengembangan ekonomi syariah yang berkeadilan, keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai aktor utama pembangunan. Komunitas dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam membangun budaya ekonomi Islam, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi dari bawah (*bottom-up transformation*). Di Kota Tasikmalaya, keberadaan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta organisasi keagamaan seperti PC Nahdlatul Ulama dan PD Muhammadiyah menunjukkan tingginya potensi civil society dalam pengarusutamaan ekonomi syariah. Dalam pendekatan MCDA, partisipasi aktif komunitas memperoleh nilai bobot tinggi karena kemampuannya dalam menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah dan memobilisasi dukungan sosial dalam waktu cepat. MES, misalnya, menjadi wadah strategis untuk kolaborasi lintas sektoral dan edukasi publik mengenai keuangan syariah, bisnis halal, dan potensi wakaf produktif. NU dan Muhammadiyah, sebagai dua ormas Islam terbesar, memiliki aset sosial, jaringan kelembagaan, dan kapasitas kultural yang sangat besar untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dari level akar rumput. Pesantren, koperasi syariah, dan BMT yang dikelola oleh kader ormas menjadi ujung tombak dalam penguatan ekonomi mikro berbasis komunitas. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan komunitas perlu difokuskan pada peningkatan literasi ekonomi syariah, pelatihan kewirausahaan, serta akses terhadap teknologi dan informasi pasar halal. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas juga perlu ditingkatkan dalam bentuk forum dialog, lokakarya, dan kemitraan proyek ekonomi berbasis nilai.

d) Media sebagai Amplifier Kesadaran Publik dan Diseminator Narasi Ekonomi Syariah

Media berperan sebagai kanal utama dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, serta menyuarakan keberhasilan maupun tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah. Dalam skema Pentahelix, media menjadi jembatan antara aktor-aktor pembangunan dengan masyarakat luas, dan memegang fungsi strategis dalam membangun *public awareness* yang konstruktif dan berbasis data. Radar Tasikmalaya dan media daring kapol.id, sebagai dua entitas media yang cukup representatif di Tasikmalaya, memiliki posisi penting dalam mengawal narasi ekonomi syariah agar tetap berada dalam koridor edukatif, objektif, dan progresif. Dalam pendekatan MCDA, peran media dinilai dari

intensitas peliputan isu ekonomi syariah, keberimbangan pemberitaan, serta kontribusinya dalam edukasi ekonomi umat melalui rubrik-rubrik tematik. Media juga dapat menjadi mitra strategis dalam publikasi produk halal lokal, promosi wisata syariah, dan penyebaran informasi mengenai regulasi atau program-program pemerintah. Di sisi lain, media digital memiliki potensi luar biasa dalam menjangkau generasi muda melalui konten kreatif seperti podcast, vlog, infografis, dan web series bertema ekonomi syariah. Pengembangan kanal media komunitas berbasis masjid, pesantren, atau komunitas lokal juga dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan seluruh elemen dalam peta Pentahelix perlu menjalin kemitraan strategis dengan media sebagai bagian dari strategi komunikasi publik yang komprehensif dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah yang berkeadilan, inovatif, dan berkelanjutan.

3. Tantangan Struktural dalam Harmonisasi Kebijakan dan Implementasi Program Ekonomi Syariah

Salah satu permasalahan mendasar yang sering dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah adalah disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah, baik dari sisi substansi regulasi maupun implementasi program. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memberikan landasan hukum yang kuat, kenyataannya banyak daerah termasuk Tasikmalaya yang masih belum memiliki turunan kebijakan daerah (Perda, Perwal, atau SK Kepala Daerah) yang secara spesifik mengatur pengembangan ekonomi syariah. Akibatnya, pelaksanaan program-program fasilitasi seperti bantuan usaha, edukasi teknologi, atau pembentukan ekosistem ekonomi syariah seringkali bersifat sporadis, tergantung pada kemauan politik (political will) pejabat daerah dan ketersediaan anggaran.

Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah pada level pengambil kebijakan, yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Ketika program tidak terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan, maka peluang besar yang ditawarkan oleh pendekatan Pentahelix menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi perencanaan lintas sektor berbasis data dan indikator kinerja ekonomi syariah agar potensi besar yang dimiliki dapat direalisasikan dalam bentuk program-program yang konkret, terukur, dan berdampak luas bagi pemberdayaan ekonomi umat.

a) Minimnya Literasi Ekonomi Syariah di Kalangan Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum

Tantangan besar lainnya yang menghambat perkembangan ekonomi syariah di daerah seperti Tasikmalaya adalah rendahnya literasi ekonomi syariah, baik di

kalangan pelaku usaha maupun masyarakat umum. Meskipun Tasikmalaya dikenal sebagai kota religius dengan basis pesantren dan ormas Islam yang kuat, pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah, transaksi bebas riba, model pembiayaan syariah, serta manfaat sistem ekonomi berbasis keadilan masih terbatas. Banyak pelaku UMKM, bahkan pengurus koperasi dan pengelola masjid, belum memahami perbedaan fundamental antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Hal ini menyebabkan rendahnya

wakaf, data potensi zakat, data koperasi syariah, serta data pelatihan dan bantuan usaha tersebar dalam berbagai institusi tanpa sistem sentralisasi, maka proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan menjadi tidak efektif. Hal ini mengakibatkan terjadinya duplikasi program, ketidaktepatan sasaran, dan bahkan kebocoran anggaran. Dalam kerangka MCDA-WDMA, data merupakan variabel utama dalam menentukan prioritas, merancang skenario intervensi, serta mengukur dampak program secara objektif. Oleh karena itu, pembangunan Syariah Data Center menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijawab melalui kolaborasi minat untuk mengakses pembiayaan syariah, lemahnya permintaan terhadap produk bersertifikasi halal, serta ketidaktertarikan terhadap skema-skema bisnis berbasis zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dalam konteks Pentahelix, peran media dan akademisi sangat vital dalam menjawab tantangan ini melalui program literasi ekonomi syariah yang bersifat masif, inklusif, dan berkelanjutan. Program literasi tidak hanya harus menyasar komunitas bisnis atau pelajar, tetapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan aparat pemerintah agar tercipta pemahaman kolektif yang mengakar. Salah satu pendekatan strategis adalah mengintegrasikan kurikulum ekonomi syariah ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal, membangun literasi digital melalui konten kreatif berbasis dakwah ekonomi Islam, serta mengadakan forum ekonomi syariah berbasis komunitas yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ruang dialog yang konstruktif.

b) Keterbatasan Akses Teknologi dan Digitalisasi dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Di era digitalisasi dan industri 4.0, pengembangan ekonomi syariah menghadapi tantangan besar dalam hal integrasi teknologi, baik pada aspek produksi, distribusi, pemasaran, maupun pelayanan. Banyak pelaku usaha syariah yang masih belum memiliki akses terhadap infrastruktur digital dasar seperti internet stabil, perangkat digital, maupun platform e-commerce halal yang memadai. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing produk syariah lokal di pasar regional maupun nasional. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam hal literasi digital, keamanan siber, dan penggunaan aplikasi bisnis juga menjadi hambatan serius. Dalam konteks fasilitasi berbasis Pentahelix, akademisi, diaspora, dan pelaku usaha diharapkan dapat menjembatani kesenjangan digital ini melalui program edukasi

teknologi, inkubasi startup syariah, dan penyediaan sistem informasi terintegrasi berbasis open source yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas secara gratis. Pemerintah daerah juga perlu berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur teknologi dasar di kawasan pesantren, pusat pelatihan usaha syariah, dan koperasi berbasis komunitas. Pembangunan marketplace halal lokal, sistem informasi wakaf digital, dan dashboard ekonomi syariah yang dapat diakses lintas sektor akan menjadi katalis dalam mempercepat transformasi digital ekonomi umat. Lebih lanjut, kerjasama dengan perusahaan teknologi dan fintech syariah menjadi hal yang tidak terelakkan guna menciptakan sistem yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, serta integritas transaksi dalam sistem ekonomi Islam yang berbasis nilai dan prinsip keadilan.

c) Lemahnya Integrasi Data dan Informasi dalam Perencanaan Ekonomi Syariah

Salah satu kelemahan paling krusial dalam pengembangan ekonomi syariah daerah adalah tidak adanya sistem data dan informasi yang terintegrasi, komprehensif, dan dapat diakses lintas pemangku kepentingan. Ketika data pelaku usaha syariah, data aset pemerintah, akademisi, dan komunitas.

Pusat data ini dapat mengintegrasikan seluruh data ekonomi syariah daerah dalam satu platform berbasis cloud dengan sistem verifikasi berbasis blockchain untuk menjamin keabsahan dan keamanan data. Media juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengumpulan dan pelaporan data, serta menyebarkan informasi mengenai program dan capaian pembangunan ekonomi syariah secara berkala. Dengan integrasi data yang kuat, maka penyusunan roadmap ekonomi syariah daerah dapat berbasis bukti (evidence-based policy), terukur, dan adaptif terhadap perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.

d) Kesenjangan Kolaborasi antar Aktor dan Inkonsistensi Implementasi Pentahelix

Walaupun pendekatan Pentahelix telah diakui sebagai kerangka kolaboratif yang ideal, realitas di lapangan seringkali menunjukkan kesenjangan dalam implementasinya. Tidak semua aktor memahami peran dan kontribusinya secara proporsional. Pemerintah kadang bersikap dominan dan menempatkan sektor lain hanya sebagai pelengkap, sementara pelaku usaha merasa enggan terlibat karena tidak adanya insentif yang jelas. Perguruan tinggi terkadang fokus pada riset akademik tanpa aplikasi praktis, dan komunitas masih terfragmentasi berdasarkan afiliasi organisasi. Hal ini menyebabkan sinergi antar aktor berjalan lambat, tidak efektif, dan seringkali bersifat simbolik semata. Padahal, keberhasilan ekonomi syariah sangat bergantung pada kekuatan jejaring sosial (social capital), transparansi kolaborasi, dan konsistensi program lintas waktu. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme formal seperti forum koordinasi ekonomi syariah daerah (FKESD), yang menjadi ruang interaksi rutin antar seluruh elemen Pentahelix untuk menyusun agenda

bersama, menyelesaikan konflik, serta mengembangkan program berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah juga perlu menetapkan indikator kinerja kolaboratif yang menjadi basis evaluasi kinerja semua pihak, termasuk media dan diaspora. Hanya dengan tata kelola kolaborasi yang baik, maka ekonomi syariah dapat tumbuh sebagai sistem alternatif yang tidak hanya unggul dalam aspek nilai, tetapi juga tangguh, adil, dan berkelanjutan.

4. Dampak Positif Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis MCDA-WDMA terhadap Ekonomi Syariah Global

Pengembangan ekonomi syariah berbasis pendekatan Multi Criteria Decision Analysis–Weighted Dynamic Multi-Attribute (MCDA-WDMA) telah membawa paradigma baru dalam perumusan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan yang inklusif serta berorientasi keberlanjutan dalam sektor ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai atribut dinamis dan saling berkaitan, seperti nilai halal, prinsip maqashid al-shariah, keberlanjutan sosial-ekologis, serta efektivitas ekonomi dalam skala nasional dan internasional. Di tengah tantangan globalisasi ekonomi, MCDA-WDMA memungkinkan pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah global—termasuk regulator, institusi keuangan, pelaku industri halal, dan konsumen—untuk memperoleh kerangka kerja pengambilan keputusan yang lebih sistematis, holistik, dan adaptif terhadap perubahan dinamis global. Dalam konteks ini, pengembangan berbasis MCDA-WDMA menjadi sangat strategis dalam menjawab tantangan kompleks seperti ketidakseimbangan distribusi nilai, kurangnya integrasi antar sektor halal, serta lemahnya instrumen pengukuran keberhasilan kebijakan ekonomi syariah secara global.

Salah satu dampak positif utama dari penerapan MCDA-WDMA dalam ekonomi syariah global adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan nilai. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan indikator kuantitatif ekonomi konvensional, tetapi juga menyerap dimensi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang sering kali tidak tertangkap dalam sistem pengukuran tradisional. Integrasi ini memungkinkan pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk membuat kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pada nilai-nilai etik dan spiritual. Sebagai contoh, keputusan investasi dalam sektor halal dapat diprioritaskan berdasarkan skoring dinamis yang mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap inklusi ekonomi. Dengan demikian, MCDA-WDMA memperkuat kredibilitas dan daya saing ekonomi syariah global karena memberikan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Selain itu, pendekatan MCDA-WDMA berperan krusial dalam mendorong integrasi lintas sektor

dalam ekosistem ekonomi syariah global. Selama ini, salah satu kelemahan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah fragmentasi antar sektor: industri halal berjalan sendiri, keuangan syariah memiliki dinamika tersendiri, sementara UMKM syariah dan sektor digital belum terhubung secara strategis. Dengan MCDA-WDMA, konektivitas antar sektor dapat dipetakan secara komprehensif melalui matriks atribut dan bobot yang disesuaikan dengan prioritas nasional dan global. Hasilnya, peta jalan pengembangan ekonomi syariah menjadi lebih terintegrasi, berfokus pada sinergi lintas sektor dan lintas negara, serta mampu mengurangi duplikasi kebijakan yang sering terjadi dalam sistem yang kurang terkoordinasi. Ini membuka peluang kolaborasi internasional yang lebih luas, seperti kerja sama antar negara OKI dalam perdagangan produk halal atau penguatan jaringan keuangan syariah global.

Secara lebih luas, MCDA-WDMA juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan ekonomi global berbasis nilai Islam. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat krisis iklim, pandemi, atau geopolitik, ekonomi syariah berbasis nilai memiliki potensi besar sebagai alternatif sistem ekonomi yang resilien dan etis. Pendekatan MCDA-WDMA memungkinkan negara-negara dengan sistem ekonomi syariah untuk merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang lebih inklusif, misalnya dalam memastikan ketahanan pangan halal, pengelolaan zakat dan wakaf sebagai safety net sosial, serta penguatan daya saing UMKM berbasis teknologi syariah. Dengan kerangka kerja yang menggabungkan evaluasi kualitatif dan kuantitatif secara dinamis, MCDA-WDMA membantu merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap guncangan eksternal, tetapi juga proaktif dalam membangun struktur ekonomi berbasis nilai spiritual dan moral.

Penerapan MCDA-WDMA dalam ekonomi syariah global memperkuat dimensi keberlanjutan (sustainability) dan keseimbangan (equity) yang menjadi isu strategis dalam forum-forum ekonomi internasional. Ketika ekonomi global bergerak menuju agenda Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi syariah memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis dalam mencapai target-target tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, kerja layak, dan pertumbuhan inklusif. MCDA-WDMA memperkuat posisi ekonomi syariah dalam forum global karena menawarkan mekanisme evaluasi keberhasilan yang sejalan dengan nilai-nilai SDGs, namun tetap mempertahankan integritas prinsip syariah. Ini sangat penting dalam menjembatani gap antara sistem ekonomi konvensional dan ekonomi berbasis spiritualitas yang lebih manusiawi. Dalam konteks ini, MCDA-WDMA menjadi instrumen transformasional yang memampukan ekonomi syariah berbicara dalam bahasa global, namun tetap berakar dalam nilai-nilai lokal dan spiritual.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya dalam ekosistem ekonomi syariah global. Dengan pendekatan MCDA-WDMA, prioritas alokasi investasi, subsidi, dan program pemberdayaan dapat disusun secara lebih objektif, berdasarkan pada bobot manfaat yang paling strategis. Misalnya, dalam konteks pembiayaan UMKM syariah, pendekatan ini dapat mengidentifikasi sektor atau wilayah dengan potensi dampak sosial-ekonomi terbesar, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan. Dalam ranah keuangan syariah, MCDA-WDMA juga membantu dalam menyusun portofolio investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Dengan demikian, pendekatan ini berkontribusi langsung terhadap efisiensi sistem ekonomi syariah global melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya yang langka dan mahal.

Pendekatan MCDA-WDMA memperkuat diplomasi ekonomi syariah global, terutama dalam membangun narasi ekonomi Islam sebagai solusi alternatif dalam tata ekonomi dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui struktur analitis yang terstandar, fleksibel, dan adaptif, MCDA-WDMA dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan praktik-praktik terbaik ekonomi syariah antarnegara, memfasilitasi knowledge sharing, serta membangun jejaring global antara pusat-pusat ekonomi syariah dunia. Dalam jangka panjang, hal ini membuka jalan bagi terbentuknya indikator global baru untuk mengukur kinerja ekonomi syariah, yang dapat diadopsi secara luas oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau UNDP. Dengan demikian, MCDA-WDMA bukan hanya sebagai pendekatan teknis, tetapi juga sebagai jembatan epistemik antara sistem ekonomi Islam dan tata kelola ekonomi global.is.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan struktural berupa belum terintegrasinya isu dan kebijakan ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendekatan MCDA-WDMA yang berbasis pada data kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima prioritas strategis yang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan serta preferensi para pemangku kepentingan, yaitu: sinkronisasi kebijakan lintas wilayah, penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan ekonomi syariah, pelibatan pesantren dan organisasi keagamaan, serta dukungan insentif fiskal dan regulasi afirmatif. Temuan ini menegaskan bahwa model MCDA-WDMA efektif dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi syariah yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi masa depan. Oleh karena itu, hasil kajian ini dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam merancang kebijakan dan

strategi pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aji Mardani, D., & Aji, D. A. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kualitas Produk Bsi Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi : Kota Tasikmalaya Tahun 2023. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. journal.iaitasik.ac.id. https://doi.org/10.70143/lazhulma.v3i2.259

Almazrouei, M. A., Morgan, R. M., & Dror, I. E. (2023). A method to induce stress in human subjects in online research environments. *Behavior Research Methods*, *55*(5), 2575–2582. https://doi.org/10.3758/s13428-022-01915-3

Bukhari, S. F. H., Woodside, F. M., Hassan, R., Hussain, S., & Khurram, S. (2022). Exploring the motives behind the purchase of western imported food products. A phenomenological study from a Muslim-dominated region. *Journal of Islamic Marketing*, *13*(2), 481–507. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0139

Ferdi Pratama, & Muhammad Subhan. (2024). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(3), 01–09. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i3.1544

Ghazi, A., Aljunid, S. A., Idrus, S. Z. S., Fareed, A., Al-Dawoodi, A., & Mohsin, A. H. (2021). Design of a Hybrid WDMA-Optical-CDMA over Multi-Mode Fiber Transmission System based on LG Modes for Short Haul-Local Area Network. *Journal of Physics: Conference Series*, *1793*(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1793/1/012016

Goyal, P., Kumar, D., & Kumar, V. (2020). Application of Multi-Criteria Decision Analysis in the Area of Sustainability: a Literature Review. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*. ijahp.org. https://doi.org/10.13033/IJAHP.V12I3.720

Hidayat, H., & Mardani, D. A. (2020). Analisis Budaya Organisasi Menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument (Ocai) Terhadap Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji (Sppbe) Pt. Giga Utama. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *8*(2), 215–222. https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2.1095

Hoseinzadeh, E., Ebadi, A., Sharif Nia, H., Sivarajan Froelicher, E., & Rahmatpour, P. (2022). Validity and Reliability of the Persian Version of COVID-19 Anxiety Syndrome Scale Among the Iranian General Population. *Frontiers in Public Health*, *10*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.845015

Islam, M. R., Aziz, M. T., Alauddin, M., Kader, Z., & Islam, M. R. (2024). Site suitability assessment for solar power plants in Bangladesh: A GIS-based analytical hierarchy process (AHP) and multi-criteria decision analysis (MCDA) approach. *Renewable Energy*, *220*. https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119595

Keller, F. M., Derksen, C., Kötting, L., Schmiedhofer, M., & Lippke, S.

(2021). Development of the perceptions of preventable adverse events assessment tool (PPAEAT): Measurement properties and patients' mental health status. *International Journal for Quality in Health Care*, *33*(2). https://doi.org/10.1093/intqhc/mzab063

Kizielewicz, B., Shekhovtsov, A., & Sałabun, W. (2021). A New Approach to Eliminate Rank Reversal in the MCDA Problems. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *12742 LNCS*, 338–351. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77961-0_29

Lestari, S., Dian, C., Hasan, S. H., & Suri, M. (2022). Product Base Budget System (PBBS) dan Implikasinya Terhadap Desa Wisata Berbasis Blue Ekonomi Product Base Budget System (PBBS) and Its Implications for Village Tourism Based on Blue Economy. *Journal of Economic …*, *8*(2), 67–80. Retrieved from http://jurnal.uui.ac.id/index.php/jecs/article/view/2666%0Ahttp://jurnal.uui.ac.id/index.php/jecs/article/viewFile/2666/1411

Malik, I. (2024). Pentahelix collaboration in the recovery and development of the Mekko Beach tourisme sector based on East Flores regency regional regulation article 12 paragraph …. *Pentahelix Collaboration in the Recovery and …*. Retrieved from https://digilib.uinsgd.ac.id/103440/

Mardani, D A. (2021). Bab 5 Pengembangan Produk Bank Syariah. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank …*. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C4ZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA68&dq=%22dede+aji%22&ots=2-ffP3GsDw&sig=RLSiavaAThG8G72v7ncU1-usE8c%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Fida-Arumingtyas-2/publication/359187142_TEORI_DAN_PRAKTIK_MANAJEMEN_BANK_SYARI

Mardani, D A. (2022). Teknologi Blockchain Dan Prospek Kontrak Cerdas Di Bidang Keuangan Islam. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8sxxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA226&dq=%22covid%22%7C%22covid+19%22+%22inflasi%22%7C%22inflation%22+%22dampak%22%7C%22impact%22+%22negara+berkembang%22%7C%22development+country%22&ots=awvtbdfNHk&sig=76BjCUFey2d0qDVwCU7

Mardani, Dede Aji. (2020). Transformasi Ekosistem Zakat Muslim Kelas Menengah. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. journal.iaitasik.ac.id. https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.8

Mardani, Dede Aji. (2022). Agama dan Marketplace : Muslim Baru Sebagai Arus Utama Dalam Pertumbuhan Ekonomi Global. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. journal.iaitasik.ac.id. https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.39

Mardani, Dede Aji, & Abidin, M. Z. (2024a). AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Agama dan Etika Ekonomi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, *7*(2), 1030–1043. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1047.Religion

Mardani, Dede Aji, & Abidin, M. Z. (2024b). Etos Kerja Pengusaha Muslim Tasikmalaya. *Researchgate.Net*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Dede-Mardani/publication/378152326_TAUHIDUCONOMIC_Etos_Kerja_Pengusaha_Muslim_Tasikmalaya/links/65cab3de34bbff5ba70c2182/TAUHIDUCONOMIC-Etos-Kerja-Pengusaha-Muslim-Tasikmalaya.pdf

Mardani, Dede Aji, Masuroh, I. S., & Ali, W. Z. K. W. (2023). Tauhidunomics: Religious Ethics and Economic Growth in Tasikmalaya. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, *6*(2), 119–132.

Matem, R., Junita, M. N., Aljunid, S. A., Romli, R., Raof, R. A. A., & Zahri, N. A. H. (2024). Performance analysis of a hybrid WDMA-OCDMA system based on 2D ZCC/MD spectral/spatial code over MMF by using Laguerre Gaussian modes. *AIP Conference Proceedings*, *2898*(1). https://doi.org/10.1063/5.0193069

Matiin, N., Mursalim, A., & ... (2024). Peningkatan Ketahanan Ekonomi Untuk UMKM Berkelanjutan Berbasis Konsep Blue Economy Pada Pantai Kenyamukan Sangatta Kutai Timur. *... Journal of Management & …*. Retrieved from https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/7536

Mauludi, S., & Mardani, D. A. (2022). Financial distress analysis at Bank Muamalat for 2016-2020. *Management, and Business (JIEMB)*, *4*(1), 1–18. Retrieved from http://journal.walisongo.ac.id/index.php/JIEMB

MIKom, F. S. M. (2023). Metode Penelitian Qualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek). umsu press.

Ninci, J. (2023). Single-Case Data Analysis: A Practitioner Guide for Accurate and Reliable Decisions. *Behavior Modification*, *47*(6), 1455–1481. https://doi.org/10.1177/0145445519867054

Nouairi, J., Affatati, A., Rivoira, G., Albaina, S. R., & Ghribi, M. (2024). Case Studies of COVID-19 Pandemic Affecting Early-Career Scientists' Mobility within theMediterranean Blue Economy Sector. *International Journal of Euro-Mediterranean Studies*, *17*(1), 87–113. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85210169817&origin=inward

Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, *9*(1), 75. https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439

Rachmawati, I. K., Bahri, S., Bukhori, M., & Hidayatullah, S. (2022). Collaboration Of pentahelix model And Jones policy implementation model In creative economic development Of Malang District Study On (Kebobang Village, Lopawon District) Gunung Kawi, Malang Regency. *International Conference on Hospitality and Tourism Studies (ICONHOSTS)*. lppm.unmer.ac.id. Retrieved from https://lppm.unmer.ac.id/webmin/assets/uploads/lf/LF2023061616868834172.pdf

Santoso, P. (2021). Metode Penelitian Qualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek). publication.umsu.ac.id. Retrieved from https://publication.umsu.ac.id/index.

php/ht/article/view/4744

Sos, F. S., & MM, M. I. (2023). *Metode Penelitian Qualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)*. books.google.com. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6hTXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA86&dq=penelitian+qualitatif&ots=BmnKpWud5b&sig=0r2O1h1NXcpEITJGBcBZOD2qSxA

Tadung, E. (2023). Opportunities and Challenges of Pentahelix Collaboration for Poverty Alleviation in Indonesia: A Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*. knepublishing.com. https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14122

Widodo, S. (2023). Pentahelix Collaboration in Tourism Development Based on Local Wisdom in Batu City. *International Conference On Economics …*, 592–604. Retrieved from https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/icoema/article/view/2236%0Ahttps://conference.untag-sby.ac.id/index.php/icoema/article/download/2236/1267

1.